

Evaluasi perubahan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Bukittinggi

Kurnia Mira Lestari*, Supratman Zakir, Darul Ilmi, Ramadhoni Aulia Gusli
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
*kurnialestari31@guru.sma.belajar.id

Abstract

We need an evaluation of a program so that we can find out what its weaknesses are. One of those programs is a curriculum at an educational institution. The Minister of Education is always making curriculum changes to education in Indonesia. In 2013 has been set by the Minister of Education curriculum 2013 after the minister of education carried out the evaluation of curricula previously and at this time has appeared also curriculums independent in the educational institutions of the curricular evaluation 2013. The research was carried out in SMAN 3 Bukittinggi and using qualitative descriptive methods in which the researchers obtained their sources from the institute as well as from the literature sources of documents, news, books and journals of previous research related to the title that the researcher did. At the moment, SMAN 3 has implemented an independent curriculum after conducting an evaluation of previous curricula implemented by the Minister of Education. Before making changes to the curriculum, the educational institute should do an evaluation first.

Keywords: Education evaluation; 2013 curriculum; Merdeka curriculum

Abstrak

Suatu program sangatlah diperlukan suatu evaluasi agar kita tahu apa kelemahan dari program tersebut. Setelah kita tahu apa kelemahan dari program tersebut kita bisa melakukan inovasi terhadap program tersebut. Salah satu dari program tersebut yaitu kurikulum di lembaga pendidikan. Menteri pendidikan selalu melakukan perubahan kurikulum terhadap pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2013 telah ditetapkan oleh menteri pendidikan yaitu kurikulum 2013 setelah menteri pendidikan melakukan evaluasi kurikulum sebelumnya dan pada saat ini telah muncul juga kurikulum merdeka di lembaga pendidikan dari evaluasi kurikulum 2013. Maka dari itu, kita akan melakukan evaluasi terhadap perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 terhadap perubahan kurikulum merdeka pada saat ini. Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Bukittinggi dan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana peneliti mendapatkan sumbernya dari lembaga tersebut serta dari sumber-sumber literatur baik itu dokumen, berita, buku dan jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang peneliti lakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu SMAN 3 Bukittinggi telah melakukan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan oleh menteri pendidikan. Pada saat ini SMAN 3 telah menerapkan kurikulum merdeka setelah melakukan evaluasi kurikulum sebelumnya yang diterapkan oleh menteri pendidikan. Sebelum melakukan perubahan kurikulum maka lembaga pendidikan ini melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Kata kunci: Evaluasi pendidikan; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka

Pendahuluan

Kurikulum adalah kerangka kerja yang kohesif yang terdiri dari komponen yang saling terkait yang saling memperkuat satu sama lain. Kurikulum terdiri dari komponen objektif, sumber daya instruksional, metodologi pengajaran, dan evaluasi. Melalui penggunaan sistem ini, seluruh sub sistem kurikulum akan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah kerangka kerja yang komprehensif yang terdiri dari tujuan spesifik, bahan instruksional, dan sumber daya pendidikan yang memberikan bimbingan untuk implementasi kegiatan belajar menuju tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah kumpulan rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, materi pengajaran, dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pengajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak ada keraguan bahwa sikap dan perilaku siswa kurang dari standar yang dapat diterima, dan agama sering dianggap bertanggung jawab atas hal ini (Lestari dkk., 2024).

Pendidikan menempatkan kurang penekanan pada nilai-nilai seperti kasih sayang, sikap mulia, dan karakter. Degradasi moral dan pola pikir siswa Indonesia secara signifikan dibentuk oleh fenomena globalisasi dan era Internet. Selain itu, anak-anak muda dari sekolah dasar hingga sekolah menengah memiliki akses yang tepat ke berbagai informasi, baik menguntungkan maupun merugikan, melalui ponsel atau bentuk media lainnya. Tanpa pengawasan, dukungan, dan dasar etika dan moral yang kuat, sangat mungkin bagi anak-anak untuk terlibat dalam korupsi dan praktik yang tidak etis di sekolah. Kurikulum telah mengalami banyak modifikasi untuk menyesuaikan dengan kemajuan dan persyaratan era saat ini. Kurikulum berfungsi sebagai instruksi bagi pendidik untuk menerapkan instruksi. Kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan serangkaian peraturan. Gunakan RPP untuk meningkatkan isi kurikulum dengan menggunakan media, prosedur, penilaian, dan sumber daya yang akurat dan relevan.

Namun, ini tidak menyangkal kemungkinan bahwa instruktur mungkin tidak cukup dilengkapi dan tidak mampu menerapkan kursus. Dalam skenario ini, perlu untuk melibatkan orang lain, terutama pengawas, kepala sekolah, dan individu lain yang memiliki kemampuan untuk mengawasi, mentor, dan instruktur untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan instruksi sesuai dengan standar yang diinginkan (Sianturi dkk., 2022). Perubahan kurikulum adalah peristiwa yang terjadi di sektor pendidikan Indonesia. Sementara beberapa menganggapnya masuk akal, ada sejumlah besar individu yang percaya bahwa reformasi kurikulum adalah langkah cepat menuju agenda politik. Namun, telah ditentukan bahwa revisi kurikulum adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada awal 2013 ada perubahan lebih lanjut dalam kurikulum. Tema ini sekali lagi menjadi isu diskursus nasional yang masih berada di bawah pengawasan. Di tengah upaya pemerintah untuk memperkenalkan kurikulum baru untuk administrator

sekolah, guru, dan parlemen, ada permintaan yang meningkat dari banyak kelompok masyarakat, terutama yang terlibat dalam pendidikan dan organisasi yang berfokus pada keunggulan, untuk menunda implementasi Kurikulum 2013. Menurut beberapa kritikus pendidikan yang menentang kurikulum 2013, sistem pendidikan kita tidak maju dan tetap bermasalah. Salah satu alasan untuk ini adalah perubahan yang sering dalam kurikulum, yang sering didorong oleh motif kekuasaan dari pada tujuan menerangi warga negara (Gusli dkk., 2024).

Bukti empiris mengkonfirmasi bahwa meskipun terjadi sosialisasi, kedua kelebihan dan kerugian terus memanifestasikan diri. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK), yang diperkenalkan pada tahun 2004 dan kemudian direvisi dan ditingkatkan dalam Kurikulum Unit Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, tidak lagi dianggap sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Beberapa bahkan menyarankan bahwa kurikulum yang usang akan menempatkan beban tambahan pada siswa dalam hal kompetensi masa depan. Boediono, misalnya, menyimpulkan bahwa siswa mengalami beban yang berlebihan karena kurikulum tradisional. Oleh karena itu, dia percaya bahwa penyesuaian segera menuju kurikulum baru diperlukan untuk mengatasi masalah pendidikan dan keterampilan di era revolusi 5.0.

Meskipun konflik menjadi jelas, penting untuk dicatat bahwa kurikulum saja bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi krisis pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 secara luas dianggap sebagai solusi optimal untuk berbagai tantangan pendidikan. Evaluasi kurikulum 2013, yang dianggap penting untuk keberhasilan pendidikan, belum menunjukkan pengaruh substansial pada kualitas pendidikan yang diharapkan. Kurikulum 2013 memiliki ketentuan yang merusak kehadiran kursus lokal, sehingga membahayakan aksesibilitas pelajaran bahasa regional. Pemerintah diharapkan tidak hanya mendorong kurikulum baru, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru sebagai kontributor utama untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi (Gusli dkk., 2023).

Survei sering menunjukkan bahwa instruktur dipandang sebagai bagian dari kurikulum tersembunyi, mengakibatkan kelalaian kompetensi mereka sehubungan dengan kualitas implementasi kurikuler di kelas. Paradigma saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kurikulum resmi, yang sering diproduksi, tidak sejalan dengan realitas dan sering mempengaruhi kinerja pengajaran guru, yang dikenal sebagai kurikuler tersembunyi, seperti yang dibahas dalam banyak publikasi. Keuntungan dan kerugian dari kursus harus dievaluasi dengan cara yang adil dan rasional, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Terlepas dari perspektif yang muncul, penting untuk mengakui bahwa ini berfungsi sebagai bukti kasih sayang dan kepedulian warga terhadap standar pendidikan di negara kita.

Kurikulum memiliki peran penting dalam mendorong perubahan fundamental dalam sistem pendidikan suatu negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai kumpulan rencana

dan pengaturan yang menguraikan tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan metode yang digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan. Berpartisipasi dalam kegiatan belajar yang sejalan dengan tujuan pendidikan tertentu. Dalam kerangka kerja khusus ini, kurikulum dapat didefinisikan sebagai *blueprint* pendidikan yang dirancang dengan baik yang menguraikan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang ingin diperoleh siswa (Ulya & Syafei, 2022).

Undang-Undang No. 20 (2003) menyatakan bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana pendidikan yang mencakup tujuan, isi, materi pengajaran, dan metode yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan belajar menuju mencapai tujuan pendidikan nasional. Inovasi kurikulum untuk Pendidikan dan implementasi dari lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum komponen khusus kurikulum Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan selama bertahun-tahun. Perubahan ini terjadi pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1985, 1994, 1997, 2004 (Revisi Kurikulum Pendidikan 1994), 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), 2006 (Kurikulum Tingkat Unit Pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, akan memperkenalkan kurikulum 2013 (Lestari dkk., 2023).

Saat ini, ada kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka yang sendiri dan terpisah dari kurikulum lainnya. Salah satu program yang dipresentasikan oleh Kemendikbud dengan peluncuran kunci memiliki pembelajaran independen di bawah mobilisasi pendidikan pusat. Sebuah kurikulum yang dapat disesuaikan dan inovatif sangat penting dalam konteks ini, terutama ketika kita transisi ke era baru yang ditandai oleh Industri 4.0 dan akan memasuki era revolusi 5.0. Akibatnya, pembelajaran jarak jauh siap menjadi tren yang dominan di masa depan, membutuhkan kurikulum yang sangat serbaguna. Kebebasan belajar melibatkan menyediakan ruang yang cukup untuk inovasi dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi global. Pencapaian hasil pembelajaran berkualitas tinggi tergantung pada berbagai faktor. Pendekatan instruksional guru secara signifikan mempengaruhi efektivitas pencapaian-Nya.

Di Indonesia, ada kecenderungan dominan dalam proses belajar di mana fokusnya masih sebagian besar pada instruktur. Ini berarti bahwa guru cenderung untuk terlibat dalam lebih banyak ceritanya atau kuliah selama kegiatan belajar. Siswa menunjukkan kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, sementara guru gagal menggunakan sumber daya instruksi, menghasilkan pengalaman belajar yang pasif dan kurang menguntungkan. (Aransyah dkk., 2023) Pentingnya evaluasi pendidikan formal tidak bisa ditebak. Melalui evaluasi guru, nilai kinerja selama proses pengajaran dan belajar diakui, menekankan pentingnya evaluasi pembelajaran (Iskandar, 2020). Evaluasi pengembangan kurikulum dapat menawarkan wawasan berharga untuk pengaturan dan integrasi rencana perbaikan dalam sistem (Iskandar & Putri, 2020). Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan

Budaya, telah mengatasi tantangan pendidikan yang ada dengan menerapkan kebijakan otonomi akademik.

Nadiem Makarim, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara terbuka menyatakan bahwa konsep pembelajaran bebas adalah upaya untuk mengaktualisasikan kebebasan intelektual. Kebijakan ini dimulai dengan meningkatkan standar kualitas para pendidik (Yustiyawan, 2019). Nadiem juga mengecam institusi pendidikan saat ini karena gagal mengembangkan metode evaluasi mereka sendiri untuk mengukur hasil belajar. Kebijakan ini memberikan lembaga pendidikan kesempatan yang menjanjikan untuk menyelidiki dan meningkatkan standar pendidikan di bidang masing-masing. Kebijakan Pembelajaran Gratis dengan Kurikulum 2013 memperkenalkan beberapa perubahan signifikan, termasuk: (1) implementasi ujian sekolah standar nasional (USBN) yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah; (2) transformasi ujian nasional (UN) menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter; (3) memberdayakan pendidik untuk merancang rencana implementasi pembelajaran (RPP); dan (4) peningkatan fleksibilitas dalam peraturan untuk penerimaan siswa baru (PPSB) (Faiz dkk., 2022).

Penulis menemukan kebijakan visioner Kemendikbud, yang menantang paradigma kurikulum tradisional, menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mengungkap implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar pada pengembangan desain evaluasi di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa analisis yang berkaitan dengan penilaian Kurikulum 2013 dan kurikulum alternatif. Oleh karena itu, para peneliti bertujuan untuk membangun perpustakaan baru untuk mengevaluasi kemajuan saat ini dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Melalui proses evaluasi, data akan dikumpulkan tentang implementasi praktik pendidikan dan sejauh mana siswa telah mencapai hasil belajar mereka. Evaluasi pelajaran juga dapat berfungsi sebagai penilaian komprehensif dan pengenalan untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan atau jawaban untuk kekurangan dan kesulitan yang mungkin terjadi. Berdasarkan temuan studi ini, adalah mungkin untuk membuat keputusan tentang kurikulum, metode pengajaran, dan inisiatif bimbingan. Kebutuhan untuk pemantauan dan evaluasi untuk upaya implementasi kurikulum tidak dapat ditebak. Fokus penulis terletak pada menyelidiki pengawasan dan evaluasi kurikulum dalam domain akademis, seperti yang ditunjukkan oleh deskripsi sebelumnya.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan studi perpustakaan untuk mengumpulkan berbagai referensi pada analisis evaluasi kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan observasi ke lembaga pendidikan, dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul, dan termasuk jurnal maupun dokumen peraturan pemerintah yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti buat (Sugiyono, 2014). Lalu

diperiksa dengan hati-hati untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang penilaian otentik di bidang pendidikan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti kemudian merumuskan pandangan mereka tentang penerapan evaluasi kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Setelah peneulis mendapatkan data dari beberapa sumber maka penulis melakukan analisis data tersebut agar bisa di simpulkan hasil dari penelitian ini. Penelitian ini penulis melakukan penelitian di SMAN 3 Bukittinggi untuk mendapatkan datanya

Hasil dan Pembahasan

A. Evaluasi Kurikulum

Pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak transformasi dan perbaikan dalam kebijakan kurikulum sejak kemerdekaan (Iskandar, 2019). Kurikulum di Indonesia telah mengalami minimal sebelas kali perubahan dinamis sepanjang sejarahnya. Dimulai dengan era pra-kemerdekaan dengan cara yang rudimenter, dan berkembang secara bertahap selama tahun-tahun kemerdekaan pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013 (Warits, 2019). Kebijakan modifikasi kurikulum ditetapkan berdasarkan hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan kesulitan dinamis yang dihadapi secara internal dan eksternal.

Dalam kerangka khusus ini kurikulum dilihat sebagai produk kebijakan dapat berubah dipengaruhi oleh keadaan khusus dan bersifat komparatif (Jono, 2016). Kebijakan kurikulum adalah kontekstual, yang berarti sangat dibutuhkan dan tergantung pada keadaan spesifik saat itu. Ini juga relatif karena dianggap baik atau sempurna selama usia tetapi akan menjadi tidak relevan di masa depan. Dengan demikian, prinsip dasar dari kebijakan kurikulum adalah kehadiran simultan alterasi dan persistensi (Daniel, 2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Konten untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar ini dirancang untuk membantu siswa mencapai Standar Kompetensi Pascasarjana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar konten berfungsi sebagai panduan bagi praktisi pendidikan, memberi mereka pemahaman yang jelas tentang rentang dan jenis item yang perlu disajikan. Hukum pemerintah membutuhkan tingkat keahlian tertentu dalam proses belajar dan penilaian.

B. Evaluasi Kurikulum 2013

Revisi 2013 dari kurikulum adalah yang terakhir setelah 10 perubahan kurikulum yang signifikan. Proses inovasi kurikulum dapat dilihat sebagai proses yang produktif dan dinamis karena dipengaruhi oleh banyak perspektif ahli pendidikan dan pembuat kebijakan. Selain itu proses modifikasi kurikulum harus berkelanjutan karena merupakan hasil alami dari tuntutan dan tantangan yang berkembang dari era saat ini. Dalam masyarakat yang berkembang pesat didorong oleh teknologi dan pengetahuan seringkali ada perubahan yang luas mengenai prioritas tujuan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan oleh jumlah besar pengetahuan yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum dan berbagai minat dan

aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, menyesuaikan perspektif subjek dengan organisasi dalam kurikulum adalah tugas yang menantang. Sederhananya kehadiran sejumlah besar pengetahuan keberadaan filosofi pendidikan yang berbeda dan berbagai teori belajar dan pengembang kurikulum bersama dengan pilihan bahan pengajaran, pemilihan kegiatan belajar, dan penciptaan pengalaman belajar, serta sistem evaluasi untuk kurikulum dan pembelajaran akan mengalami proses yang menantang dari diskusi (Angga dkk., 2021).

Kurikulum 2013 didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat Indonesia yang mencakup dasar sosiologis, psikopedagogi, dan teoritis. Tujuan utamanya adalah untuk membekali rakyat Indonesia dengan keterampilan dan kualitas yang diperlukan untuk hidup sebagai individu dan warga yang setia, produktif, kreatif, inovatif, dan cerdas secara emosional. Selain itu, ia bertujuan untuk memungkinkan mereka untuk membuat kontribusi yang berarti bagi masyarakat, bangsa, negara, dan peradaban global. Kurikulum yang diperbarui tahun 2013 mendefinisikan pembelajaran abad ke-21 sebagai pendekatan baru di lembaga pendidikan yang memprioritaskan kemampuan siswa untuk mengumpulkan informasi dari banyak sumber, mengidentifikasi masalah, terlibat dalam pemikiran analitis dan kolaboratif, dan bekerja sama untuk memecahkan tantangan (Litbang Kemdikbud, 2013). Kerangka pembelajaran abad ke-21, seperti yang didefinisikan oleh BSNP (2010), terdiri dari keterampilan 4C: keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan kemampuan inovasi. Selain itu, kurikulum 2013 menggabungkan peningkatan kecerdasan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan pendidikan karakter dalam hal pengembangan karakter dan nilai-nilai spiritual Indonesian Partnership for 21st Century Skill Standard (IP-21CSS) (Kurniawan, 2019).

Penilaian otentik menawarkan metode komprehensif untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Indikator utama bisnis mencakup tidak hanya bagian kognitif, tetapi juga aspek emosional dan psikomotor. Implementasi Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Ini termasuk proses evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengevaluasi banyak faktor yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk memverifikasi bahwa kinerja sebenarnya sejalan dengan strategi dan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Pemain penting dalam proses evaluasi adalah instruktur. Peraturan Menteri Pendidikan No. 104 Tahun 2014, pasal 1 mendefinisikan penilaian hasil belajar sebagai proses yang sistematis dan direncanakan untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang pencapaian pembelajaran siswa di bidang sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Penilaian ini dilakukan oleh pendidik selama dan setelah proses belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menggunakan metode otentik dan non-otentik (Puspa dkk., 2014).

C. Kebijakan Merdeka Belajar

Analisis kebijakan adalah proses kognitif yang telah diakui dan digunakan secara luas sepanjang sejarah manusia. Istilah "politik" adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *policy*, yang mengacu pada pengelolaan urusan atau keprihatinan publik. Sebagai perbandingan, pendidikan adalah terjemahan dari istilah politik pendidikan, yang terdiri dari dua kata. Hasbullah menyatakan bahwa politik pendidikan memiliki makna yang sama dengan politik pemerintah di bidang pendidikan. Analisis politik adalah disiplin ilmu sosial yang diterapkan yang menggunakan argumen rasional berdasarkan bukti-bukti fakta untuk mengklarifikasi, menilai, dan menghasilkan ide-ide yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Merdeka Belajar adalah rencana kebijakan yang baru didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kementerian pendidikan menerapkan kebijakan studi independen untuk tujuan tertentu. Program Penilaian Mahasiswa Internasional (PISA) 2019 mengungkapkan bahwa siswa Indonesia berada di peringkat keenam dari bawah dalam hal penilaian. Secara spesifik, dalam matematika dan membaca, Indonesia menempati tempat ke-74 dari 79 negara. Literasi mencakup tidak hanya keterampilan membaca, tetapi juga kemampuan untuk secara kritis menganalisis substansi materi tertulis dan memahami konsep-konsep yang mendasari.

Tujuan pembelajaran bebas adalah untuk meningkatkan signifikansi proses pembelajaran. Tujuan utama dari program ini bukan untuk menggantikan program yang aktif, tetapi untuk meningkatkan sistem saat ini. Autonomi pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbud memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih efisien. Adit menunjukkan bahwa kesederhanaan implementasi pembelajaran dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut: (1) Guru tidak lagi perlu membuat rencana pelajaran yang terlalu rumit seperti sebelumnya, (2) Sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru, yang telah ada selama beberapa tahun, akan berlanjut tetapi dengan lebih banyak fleksibilitas dalam implementasinya, (3) Mulai tahun 2021, ujian nasional, yang sudah menjadi beban bagi siswa, akan digantikan dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter, dan (4) Ujian Sekolah Standar Nasional (USBN) akan diganti dengan evaluasi berkelanjutan seperti portofolio, yang mencakup tugas kelompok, tugas tertulis, dan latihan praktis (Adit, 2019). Jika sebelumnya telah dinyatakan bahwa evaluasi dalam pembelajaran otonom berfokus pada evaluasi berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik yang ditetapkan dalam kurikulum 2013 masih berlaku untuk dimasukkan ke dalam program.

Mendikbud baru saja menggantikan kurikulum 2013 dengan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada tahun 2019. Konsep MBKM terdiri dari dua konsep yang berbeda, yaitu "Merdeka Belajar" dan "Kampus Merdeka". Implementasi kebijakan pembelajaran independen adalah elemen penting dalam mencapai tujuan SDM Unggul Indonesia, yang mencakup pengembangan Profil Mahasiswa Pancasila

(Kemdikbud, 2021). Menurut World Economic Forum (2016), siswa diminta untuk memiliki 16 kompetensi di abad ke-21. Secara luas, 16 bakat ini dikategorikan menjadi tiga kelompok: literasi, kompetensi, dan atribut karakter. Selain itu, untuk menghadapi transformasi yang cepat di bidang sosial, pasar tenaga kerja, domain perusahaan, dan kemajuan teknologi, siswa harus dilengkapi untuk secara efektif beradaptasi dengan perubahan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap institusi pendidikan untuk menetapkan hambatan-hambatan kemasyarakatan dan memberikan orientasi yang dipandu di bidang pendidikan (Lase, 2019).

Persiapan perguruan tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan dan melaksanakan metode pendidikan kreatif yang memungkinkan siswa untuk secara efektif dan konsisten memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap di seluruh domain kognitif, emosional, dan fisik, seperti yang dijelaskan dalam Kurikulum MBKM. Terlepas dari penyebaran dan pengenalan ide Merdeka Belajar melalui berbagai cara seperti sesi in-person atau media Online, banyak pendidik dan orang tua tetap bingung dengan konsep MBKM. (CNN Indonesia, 2021). Studi ini bertujuan untuk berfungsi sebagai sumber daya komprehensif bagi akademisi dan praktisi yang ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang MBKM dan kurikulum MBKM. Kurikulum pendidikan tinggi mengacu pada pengaturan yang disengaja dari proses pendidikan atau kegiatan belajar dengan tujuan mencapai hasil belajar tertentu yang melampaui sekumpulan saja kursus. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen fundamental, termasuk tujuan, kompetensi, konten, kriteria evaluasi, dan standar pembelajaran (Kodrat, 2012).

Kurikulum MBKM mencakup bidang-bidang ini. Kurikulum MBKM didasarkan pada Undang-Undang No. 12 tahun 2012 dan pendekatan Pendidikan Berbasis Hasil. Kurikulum ini dirancang untuk mengikuti pola dan tahap spesifik, yang telah dimasukkan ke dalam pengaturan program studi. Implementasi kebijakan dan pengembangan kurikulum MBKM mempertimbangkan dan dipengaruhi oleh regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS (Vhalery dkk., 2022). Kurikulum MBKM, yang terbaru di Indonesia, memprioritaskan pembelajaran pengalaman baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini terlihat melalui pengembangan delapan kegiatan pendidikan, termasuk pertukaran siswa, magang, bantuan pengajaran, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen/proyek, dan penciptaan desa/perguruan tinggi tematik dunia nyata, yang merupakan inti dari perubahan kurikulum. Dari sudut pandang evaluatif, MBKM memprioritaskan penilaian karakteristik yang mewakili prinsip-prinsip Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan dasar identitas nasional Indonesia. Selain itu, alat evaluasi telah dibuat dan disesuaikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan keterampilan lulusan, menyesuaikannya dengan tuntutan industri, perusahaan, dan prospek karier masa depan sesuai dengan perubahan waktu.

Maka dari itu dilembaga pendidikan khususnya di SMAN 3 Bukittinggi selalu mengikuti perkembangan pendidikan yaitu inovasi dari perubahan kurikulum.

Kementrian pendidikan selalu melakukan evaluasi terhadap kurikulum supaya bisa melihat kelemahan kurikulum saat ini. Setelah melihat kelemahan kurikulum maka dilakukanlah inovasi kurikulum untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, SMAN 3 Bukittinggi juga melakukan evaluasi kurikulum supaya bisa juga melakukan inovasi kurikulum dan menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri pendidikan agar bisa mewujudkan tujuan sekolahnya. SMAN 3 Bukittinggi telah menerapkan kurikulum merdeka di lembaga pendidikannya setelah melakukan evaluasi kurikulumnya.

Kesimpulan

Ulasan kurikulum memiliki makna yang signifikan dalam bidang pendidikan. Mengevaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan kurikulum diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, pengembang kurikulum komunitas, dll., untuk menetapkan standar untuk meningkatkan dan memajukan kurikulum di masa depan, sehingga memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efisiensi yang mungkin. Penilaian kurikulum adalah faktor penting dalam bidang pendidikan. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan dalam proses perencanaan dan implementasi kurikulum yang telah digunakan, evaluasi sangat penting. Dapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan, termasuk orang tua, instruktur, dan pembuat kurikulum, untuk digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan dan memajukan kurikulum masa depan. Ini akan memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dengan efisiensi maksimum. Kurikulum pembelajaran independen bertujuan untuk meningkatkan signifikansi proses belajar. Tujuan utama dari program ini bukan untuk menggantikan program yang aktif, tetapi untuk meningkatkan sistem saat ini. Kemendikbud memberikan kemandirian pendidikan yang memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih efisien. Selain itu, kurikulum MBKM, yang merupakan yang terbaru di Indonesia, menempatkan penekanan yang kuat pada kegiatan belajar ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Hal ini dapat diamati melalui pengembangan delapan kegiatan pendidikan, termasuk pertukaran siswa, magang/magang, bantuan pengajaran di unit pendidikan, penelitian/reset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen/proyek, dan pembentukan desa/perguruan tinggi tematik dunia nyata, yang merupakan inti dari perubahan kurikulum.

Daftar Pustaka

- Angga, Suryana, Nurwahidah, Hernawan, & Prihantini. (2021). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2541–2549. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Aransyah, A., Herpratiwi, Adha, M. M., Nurwahidin, M., & Yuliati, D. (2023). Implementasi Evaluasi Modul Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Terhadap Peserta Didik SMA Perintis 1 Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Pendidikan : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran*, 8(1), 136.

- <https://doi.org/10.33394/jtp.v8i1.6424>
- Daniel. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. *PROSPECTS*, 49(1), 91–96. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3>
- Faiz, Parhan, & Ananda. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550.
- Gusli, R. A., Iswantir, M., Akhyar, M., & Lestari, K. M. (2024). Inovasi kurikulum pendidikan Islam Era 4.0 di MTsN 1 Pariaman. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(2), 77–88. <https://doi.org/10.32832/idarah.v5i2.16401>
- Gusli, R. A., M. I., & Akhyar, M. (2023). *Konsep Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Lembaga Islam Di MTs S Sungai Rambah Kabupaten Padang Pariaman*. 4(2), 61–78. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v4i2.197>
- Iskandar. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1.
- Iskandar. (2020). Evaluasi Program Pembelajaran Berbasis Hots (Higher Order Thinking Skills) Di Mi At-Taqwa Guppi Wojowalur Yogyakarta Tahun aJARAN 2018/2019. *Jurnal Bunayya*, 1(3), 168–195.
- Iskandar, & Putri. (2020). Persepsi Kepala Madrasah Ibtidaiyah terhadap Kinerja Supervisi Manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kota Yogyakarta. *Dirāsāt Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 158–181.
- Jono. (2016). Studi Implementasi Kurikulum Berbasis Kkni Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di Lptk Se-Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 57–68. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/148>
- Kodrat. (2012). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i1.60>
- Kurniawan. (2019). Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia. *Intizar*, 25(1), 55–68. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3242>
- Lestari, K. M., Iswantir, M., & Gusli, R. A. (2024). Teori pembelajaran dan dampaknya pada pengembangan kurikulum di SMAN 3 Bukittinggi. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.32832/idarah.v5i2.16405>
- Lestari, K. M., Zakir, S., & Gusli, R. A. (2023). Penerapan AI dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 3 Bukittinggi. *Jurnal Yudistira*, 2(1), 277–289. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i1.434>
- Puspa, Pradyani, Marhaeni, & Suarni. (2014). Pengaruh Penerapan Asesmen Kinerja Terhadap Kemampuan Menulis Dalam Bahasa Jepang Dengan Kovariabel Kemampuan Verbal Pada Siswa Kelas Xii Ipb Sma Negeri 1 Banjarsri. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 4.
- Sianturi, E. R., Simangunsong, F. A., Zebua, E. Y., & Turnip, H. (2022). Pengawasan Dan Evaluasi Kurikulum. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 175. <https://doi.org/10.29300/btu.v4i1.1995>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulya, N., & Syafei, M. M. (2022). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9412–9420. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3905>
- Vhalery, Setyastanto, & Leksono. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1),

185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Warits. (2019). Manajemen pengembangan kurikulum pendidikan madrasah dalam mewujudkan madrasah bermartabat. *JPIK Septembe*, 2(2), 496–525.
- Yustiyawan. (2019). Penguatan Manajemen Pendidikan Dalam Mutu Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIE IBMT Surabaya. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n1.p1-10>